ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KAJIAN EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RINALDI

NIM: 0501163203

Program Studi

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1442 H

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAMPENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KAJIAN EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

MUHAMMAD RINALDI

NIM: 0501163203

Program Studi

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Rinaldi
Nim	: 0501163203
Tempat/tgl Lahir	: Medan/ 10 Desember 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Medan – Banda Aceh. KW. Simpang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KAJIAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)"** benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan di dalamnya, sepenuh menjadi tanggung jawab saya demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuh menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

Muhammad Rinaldi

NIM. 0501163203

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM KAJIAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)

Disusun Oleh:

Muhammad Rinaldi

NIM. 0505163203

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 10 Maret 2021

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr.Zuhrinal M. Nawawi, MA	**Sri Ramadhani, MM**
NIP.197608182007101001	**NIP. 19751015202005012004**

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Islam

Imsar,M.Si

NIP.1976012622003122003

NIDN. 2003038703

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK PENGENTASAN DALAM KAJIAN EKONOMI DALAM (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)"** atas Nama Muhammad Rinaldi, NIM. 0501163203, program studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 22 April 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 10 juni 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Sekretaris

Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDIN. 0126099001

Anggota

Dr.Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP.197608182007101001

Sri Ramadhani, MM
NIP. 19751015202005012004

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

Mawaddah Irham, M.E.I
NIDN. 20140448601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Muhammad Rinaldi (0501163203), "ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KAJIAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)". Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Zuhrinal M. Nawawi, MA dan Pembimbing II Sri Ramadhani, MM

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan bagi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari data yang didapat pada PKH di kabupaten aceh tamiang sangatlah terbantu adanya PKH di kampung mereka sendiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (*indepth interview)* dan didukung oleh studi kepustakaan, Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data skunder yang peneliti gunakan berupa dokumen, buku-buku, serta jurnal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Tamiang terbagi atas kesehatan dan pendidikan Diantaranya ibu hamil, anak usia dini (Balita), anak sekolah SD, SMP, SMA, disabilitas berat dan lanjut usia. Kemudian Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang) Mereka juga berharap agar PKH terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi keluarga miskin baik dalam kesehatan maupun pendidikan.

Kata kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan, dan Penerima PKH Kabupaten Aceh Tamiang

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulilah Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahuwata'alla yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT KAJIAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)".**

Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wassalam sebagai suri tauladan bagi umat manusia didunia.

Seluruh keluarga yang paling peneliti sayangi, dan cintai yang selalu memberikan Doa, semangat, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat –nasihat yang selalu peneliti ingat kapanpun dan dimanapun. Terkhusus untuk kedua orang tua peneliti Bapak **Muhammad Syamsul** dan Ibu **Suriani.**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai ujian hambatan dan segala masalah yang penulis jadikan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan demi dua malaikat yang senyum nya saja mampu membakar semangat tiada henti, senyum yang menguatkan seluruh jiwa raga ini, miliku yang paling spesial didunia ini (Ibu dan Ayah) dan segala bantuan - bantuan lainnya dari orang–orang tercinta dan terspesial dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak **Imsar, M.Si** selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak **Rahmat Daim Harahap, M. Ak** selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Zuhrinal M. Nawawi, MA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang selalu memberikan support dalam membimbing peneliti untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu **Sri Ramadhani, MM**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang sangat baik sekali telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini baik dalam hal memberikan bimbingan dan masukan.
7. Terima kasih Kepada Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang yang telah memberikan izin peneliti di Kab. Aceh Tamiang.
8. Dan teruntuk kepada pendamping PKH di Kab. Aceh Tamiang yaitu Abangda **Anwar** dan abangda **Irwansyah** yang telah membantu untuk terjun kelapangan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
9. Bapak **Dr. M. Ridwan, MA**, selaku Dosen Penasehat Akademik yang juga sangat baik telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam segala bentuk kegiatan perkuliahan serta ikut andil dalam mensukseskan proses pengerjaan skripsi.
10. Terima kasih kepada bapak/ibu dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama perkuliahan berlangsung.
11. Kepada teman – teman sejawat, khususnya **Ekonomi Islam - C 2016** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, Terimakasih untuk pertemanan yang sudah terjalin hampir 4 tahun banyak cerita dan kenangan yang udah kita lalui semoga pertemanan ini bisa terus terjalin dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di lain waktu dengan cerita kesuksesan kita masing-masing.
12. Serta teman-teman yang selalu mendukung saya dalam segala kegiatan baik diperkuliahan maupun diluar perkuliahan.

13. Terima kasih kepada **Kenjo Coffee N Roastery** yang telah memberikan saya ruang untuk belajar.
14. Terima kasih juga kepada Responden yang telah mengisi luang waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi ini yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi kepada peneliti untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
15. Terima kasih kepada My Suport Sistem **Wulandari, S.Akun** yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan selesai.

Terakhir peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Medan, 10 Maret 2021
Penulis

Muhammad Rinaldi

NIM.0501163203

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat penelitian 7
E. Batasan Istilah 8
BAB II KAJIAN TEORITIS **9**
A. Kajian Teoritis 9
1. Program Keluarga Harapan (PKH) 9
a. Pengertian Keluarga Harapan (PKH) 10
b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 10
c. Syarat Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) 11
d. Hak dan Kewajiban Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) 11
2. Kemiskinan 13
a. Pengertian Kemiskinan 13
b. Bentuk dan Jenis Kemiskinan 15
c. Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 16
d. Pengentasan Pengentasan Kemiskinan menurut Ekonomi Islam . 17
3. Kesejahteraan Masyarakat 19
a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 19
b. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat 20
c. Kesejahteraan Dalam Islam 20

d. Pengertian Kesejahteraan (*Fallah*) Dalam Ekonomi Islam 22
B. Kajian Terhadahulu 24
C. Kerangka Teoritis 30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 31
A. Pendekatan Penelitian 31
B. Lokasi dan waktu penelitian 31
C. Subjek Penelitian 31
D. Sumber Data 32
E. Analisis Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Gambaran Umum Kab. Aceh Tamiang dan Program Keluarga Harapan (PKH) 35
1. Letak Geografis Kab. Aceh Tamiang 35
2. Ruang Lingkup Keadaan Kab. Aceh Tamiang 36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 41
1. Gambaran Program keluarga Harapan (PKH) di Kab. Aceh Tamiang 41
2. Pelaksanaan Wawancara Kepada Informan 47
3. Bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Kab. Aceh Tamiang 47
4. Hasil Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Kajian Ekonomi Islam di Kab. Aceh Tamiang 52
BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 63

DAFTAR TABEL

1.1 Data Penerimaan PKH 5
1.2 Data Kemiskinan..... 6
2.1 Komponen Bantuan..... 13
2.2 Kerangka Teoritis..... 24
4.1 Jumlah Penduduk Kab. Aceh Tamiang 37
4.2 Jumlah Tingkat Pendidikan Kab. Aceh Tamiang 38
4.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang 40
4.4 Penerimaan PKH di Kabupaten Aceh Tamiang per Kecamatan 41
4.5 Data Informan Berdasarkan Usia..... 43
4.6 Data Informan Berdasarkan Pendidikan 44
4.7 Data Informan Berdasarkan Pekerjaan..... 44
4.8 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 44
4.9 Profil Informan Masyarakat Kab. Aceh Tamiang 45

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Teoritis 22
3.1 Model Analisis Data 34
4.1 Wawancara Kepada Ibu SL 49
4.2 Wawancara Kepada Ibu SD 50
4.3 Wawancara Kepada Ibu DS 51
4.4 Wawancara Kepada Ibu RM 52
4.5 Wawancara Kepada Ibu TR 55
4.6 Wawancara Kepada Ibu MS 56
4.7 Wawancara Kepada Ibu NR 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar pada tahun 2007 yaitu 231,6 juta jiwa dan di anugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi sungguh sesuatu yang ironis menurut data badan pusat statistik (BPS) tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 37,17 juta jiwa atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan laporan dari Bank Dunia (*World Bank*) adalah hampir setengahnya dari penduduk di Indonesia hidup miskin atau rentan terhadap kemiskinan. Dengan kondisi hampir 42% rumah tangga hidup di antara garis kemiskinan US$1 hingga US$2 per-hari, terlalu banyak rakyat Indonesia yang sangat rentan jatuh miskin. Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemis-kinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda.[1]

Kemiskinan sebagai bentuk ancaman dan merupakan masalah besar yang telah ada sejak dahulu sampai sekarang terutama bagi negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Pertanyaannya maukah umat Islam bergerak dan merubah nasib dari tidak berdaya menjadi berdaya. Menurut *mufasir* AL Qur'an Muhammad Quraish Shihab melihat dari akar kata "miskin" berarti diam atau tidak bergerak, maka dapat diperoleh pesan, faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri enggan atau tidak mau bergerak dan berusaha.[2] Keengganan berusaha adalah penganiayaan diri sendiri. Berarti tidak mau berubah dalam arti tidak mau merubah nasibnya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dalam ajaran agama Islam, sesuai dengan Al Qur'an Surat Ar Rad ayat 11.

---

[1]Nunung Nuewati, *Kemiskinan:Model Pengukuran, Pemasalahan dan Alternatif Kebijakan.*Jurnal (Kependudukan Padjadjaran 2018 Vol. 10,No. 1) h. 2

[2]Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir AL Qur'an*, h. 382

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ
وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

Artinya : ”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.[3]

Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang kalau dirinya sendiri tidak ada upaya atau ikhtiar untuk merubah dirinya sendiri. Sedangkan ketidakmampuan berusaha yang disebabkan orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Lebih jelas lagi, jaminan rizqi yang dijanjikan Allah SWT ditujukan untuk makhluk yang dinamakan *dabbah*, artinya bergerak. Hal ini sesuai dengan penggalan ayat Al Qur’an dalam Surah Huud : 6 yang artinya “apa saja yang melata di atas bumi rezeki dijamin Allah SWT”.

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (non-income factors) seperti akses kebutuhan minimun; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan. Tulisan ini mencoba memaparkan tentang kemiskinan berdasarkan konsep, model pengukuran dan alternatif model dalam

[3] Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya, Halim, 2014), h. 250.

upaya mengentaskan kemiskinan. Di Indonesia ini ada beberapa program yang dapat menanggulangi kemiskinan salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan bagi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.[4] Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup sebagai salah satu program pengetasan kemiskinan yang digulirkan oleh kementrian sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan.

Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail. Proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi proses persiapan pelaksanakan mulai dari pemilihan kabupaten atau kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH. Selain itu, dalam proses pengumpulan data dan informasi harus ada kerjasama antar satuan kerja terkait. Dengan adanya kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.[5]Dalam islam juga dijelaskan dalam bentuk program pemberian bantuan sosial yang dinamakan dengan *Ziswaf*.

---

[4]www.kemsos.go.id, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 10.08 WIB.

[5]Dedy Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto.*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin.* Jurnal (Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, h. 32.

Zakat, Infaq, *shadaqah* dan *waqaf* (ZISWAF) merupakan sebagai wujud kepedulian kepada kaum dhuafa' yang diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lemah dan meningkatkan kesejahteraan ummat. Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan *Waqaf* (ZISWAF) yang terhimpun yang akan disalurkan kepada para dhuafa' dan 8 Ashnaf dalam bentuk program seperti, program beasiswa dhuafa', Dakwah islam, bantuan lansia, Ramadhan berbagi, Waqaf tanah, Pemberdayaan ekonomi, Hibah sarana kerja, Aksi Tanggap Bencana, Tebar Hewan kurban dan Waqaf uang. Dengan tujuan mengelola dana sosial tersebut menjadi sesuatu yang berguna bagi sesama untuk anak yatim piatu, kaum dhuafa', fakir dan miskin yang ingin mengembangkan usahanya teatpi terkendala dengan kondisi perekonomiannya.[6]

Pelaksanaan Program Ziswaf ini diantaranya Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf. Sedangkan zakat adalah penghasilan untuk kepentingan sosial yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Disini terdapat perbedaan dengan zakat, dimana zakat harus jelas nishab dan haulnya sedangkan dalam infaq tidak perlu adanya nishab dan haul. Infaq adalah memberikan harta sebagai suatu amal ibadah kepada Allah SWT. Dan amal sosial masyarakat serta kemanusiaan dalam menyerahkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Shadaqah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Wakaf adalah menahan suatu untuk mendapatkan manfaat dari suatu tersebut. secara istilah wakaf adalah menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah SWT. Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha[7]. Islam sangat memperhatian ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga dan Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan,

---

[6] Ikfa Nurul Faudah, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baitul Maal KSPPS Binama KC Tlogosari,* Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:2018) h.6

[7] Irfan Syauqi Beik dkk, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi,* (Jakarta:PT Grafindo Persada,2016) h.70

kesejahteraan pada seluruh ciptaan-Nya. Untuk terlepas dari perangkap kemiskinan, sesungguhnya Allah SWT menganjurkan umatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya sehingga ia mampu mencapai kesejahteraan.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, presiden RI telah mengeluarkan Perpes No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden RI, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*), sedangkan untuk penyelengaraan Program Keluarga Harapan (PKH) terlaksana di KAB. Aceh Tamiang di mulai pada tahun 2013 dan terlaksana sampai saat ini. Berikut data jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2015-2019 di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 1.1

Jumlah Penerima PKH (Keluarga)

No.	Tahun	Jumlah Penerima PKH
1.	**2015**	**3357**
2.	**2016**	**7388**
3.	**2017**	**7286**
4.	**2018**	**16466**
5.	**2019**	**15542**

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kab.Aceh Tamiang 2020

Dari tabel 1.1 di atas pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan penerima PKH, yang mana terjadi di tahun 2015 berposisi di angka 3.357 sedangkan di tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat drastis pada penerimaan PKH yaitu di angka 16.466 dengan selisih 13.109 dari tahun 2015, dan pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan akan tetapi tidak dikatakan menurun pada penerimaan PKH yaitu 15.542 dengan selisih 924 dari tahun 2018.

Berikut data kemiskinan Kab. Aceh tamiang dari tahun 2015-2019

Tabel 1.2

Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2015	**14,57**
2016	**14,51**
2017	**14,69**
2018	**14,21**
2019	**13,38**

Sumber: acehtamiangkab.bps.go.id

Dari tabel diatas 1.1 pada tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan penerima PKH sedangkan pada tabel 1.2 persentase penduduk miskin mengalami penurunan kemiskinan pada tahun 2019 yaitu di angka persentase 13,38 persen. Yang mana persentase tertinggi penduduk miskin terjadi pada tahun 2017 yaitu 14,69 persen dengan selisih 1,31 persen.

Dilihat dari penjelasan diatas dalam penyelenggraan Program Keluarga Harapan (PKH) adanya ketidaksesuian harapan dalam pelaksanaan program PKH di Kab. Aceh Tamiang, mengingat program PKH merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta implikasi positif PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggung jawabkan. dengan adanya permasalahan yang dikemukakan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan peneliti yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengetasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang ?

2. Bagaimana hasil Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan menurut kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)?

C. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana hasil Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan menurut kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang)

D. Manfaat Peneltian

1. **Bagi Penulis** atau peneliti, penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarajana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Islam UIN Sumatra Utara.
2. **Bagi Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang** penelitian bisa memberikan masukan agar lebih perduli terhadap masyarakat miskin guna mengurangi angka kemiskinan Kab.Aceh Tamiang.
3. **Bagi Akademisi**, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh program keluarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan.

E. Batasan Masalah

Batasan istilah ini adalah menjelaskan kata lain yang pada penelitian yang judul penelitian ini adalah Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang) maka batasan istilah dari penelitian ini adalah seputar Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan, Kajian Ekonomi Islam.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dan bagi anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.[1]

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *millennium*. Ada lima komponen MGDs (*Millennium Development Goals*) yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.[2]

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan sebagai

---

[1]www.kemsos.go.id, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.08 WIB.

[2] TNP2K, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Kartiawati,"*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Persepktif Ekonomi Islam*",*Ibid.*,11.

penerima manfaat PKH dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM.

Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu :

1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).[3]

c. Syarat Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan diberikan kepada KeluargaSangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapan didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut yaitu:

1) Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita.
2) Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
3) Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
4) Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15).
5) Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikandasar termasuk anak dengan disabilitas.

---

[3] TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)* 2019, h. 2.

Selain itu, seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaanprogram dan memenuhi kewajibannya.

d. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

1) Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini Anak Usia 0-6 Tahun:

a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
b) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (*BCG, DPT, Polio.Campak, Hepatitis* B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
d) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila dilokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitasPAUD.

2) Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapacatatan seperti di bawah ini:

a) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
b) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka).
c) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
d) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
e) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
f) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak Jalanan(AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untukmendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak.

3) Dasar Hukum Pelaksanaan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan LNRI Nomor 3670)
d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

e) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Nomor 4235)[4]

4) Besaran Bantuan PKH

Tabel 2.1

Komponen Bantuan

No.	Komponen Bantuan	Nominal Bantuan (Rp)/3 Bulan
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 2.400.000
2	Bantuan anak usia dini	Rp. 2.400.000
3	Bantuan peserta pendidikan SD/sederajat	Rp. 900.000
4	Bantuan peserta pendidikan SMP/sederajat	Rp. 1.500.000
5	Bantuan peserta pendidikan SMA/sederajat	Rp. 2.400.000
6	Bantuan penyandang disabilitas	Rp. 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 60 tahun keatas/Lansia	Rp. 2.400.000

Sumber: Keputusan Dinas Sosial RI Tahun 2019

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hakhak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupanbermartabat. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnyakemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupsandang, pangan, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah inijuga akan berdampak pada berkurangnya

[4] Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*, h. 10-13.

kemampuan untuk memenuhistandar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan juga dapat didefenisikan dengan kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memanuhi kebutuhan pokok, atau ketidaksanggupan seseorang untuk memuaskan kebutuhan dan keperluan materinya, atau kondisi individu yang mengalami kekurangan relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.[5]

Menurut Soerjono Soekanto, miskin merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memeliharanya dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam kelompoknya tersebut. Sementara itu, Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa masyarakat miskin adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan.[6]

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensisecara fisik. Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang ataukesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.[7]

Dari banyaknya definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

---

[5] Isnaini Harahap, Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisiplinder, (Medan: Perdana Publishing, 2018), h. 132.

[6] Ali Khomsan dkk.,*Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, h. 2.

[7] Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005) hlm.98-99

1) Kemiskinan (*proper*)

   Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

2) Ketidakberdayaan (*powerless*)

   Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalammemperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Menghadapi situasi darurat (*state of Emergency*)

   Seseorang atau sekolompok orang yang disebut miskin tidak memiliki Kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi. Ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.[8]

b. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidakdapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasarkan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 3 bentuk yakni sebagai berikut:

1) Kemiskinan absolute

   Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

---

[8] Rulan Ahmadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan osko 100 di Kota Surabaya),* Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012), hlm. 12

2) Kemiskinan relative

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belummenjangkau keseluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanyaketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern

c. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpes No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden RI, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut:

1) Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial.Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditunjukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik.Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) dan pada tahun 2014 menjadi BPJS, Beras untuk keluarga miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

2) Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

3) Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro.Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan program-program penanggulangan kemiskinan.Salah satu program pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah adalah PKH yang berupa bantuan tunai bersyarat yang ditujukan oleh Rumah Tangga Miskin (RTM).[9]

d. Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam

Wibisono sebagaimana dikutip oleh Sri Budi Cantika Yuli, mengatakan bahwa strategi pengentasan kemiskinan Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja yaitu:

1) Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama; pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis.
2) Islam mendorong penciptaan anggaran Negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiscal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran Negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.

---

[9] TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di:http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/, (diakses pada 02 Oktober 2020).

3) Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang member manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
4) Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.
5) Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak dan wakaf.[10]

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kehidupan untuk dapat hidup layak dan terhindar dari kemiskinan, perhatian tersebut dapat terlihat baik secara individu, kelompok/masyarakat maupun di bidang pemerintahan. Dalam Islam pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang dipimpin sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ
بِالْغَيْبِۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai

[10] Sri Budi Cantika Yuli, "*Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam*", (Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.2, Juli 2013), 108-109.

manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa (QS Al-Hadid:25)[11]

6) Indikator Kemiskinan Mengukur tingkat kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan atas normanorma tertentu yang terdapat disuatu daerah. Pemilihan norma tersebutsangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua unsure, yaitu: *pertama,* pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, jumlah kebutuhan lainyang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.[12]

3. Kesejahteraan masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila iamerasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya. Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarwinto, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).

---

[11] Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya, Halim, 2014), h. 541.

[12] *Op.Cit.* Al-arif, M Noer Rianto. h.233

Menurut istilah “masyarakat” dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community* atau komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama *(communities of common interest),* baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”. Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dukuh atau kampung), desa, kota, suku, atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebutdapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tesebut dinamakan sebagai komunitas.[13]

b. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok,maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.[14]

c. Kesejahteraan dalam Islam

Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah al-falah” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini al-falah” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.[15]

Secara kebahasaan perkataan “al-falah” berarti keberuntungan, kesuksesan dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib al-Ashfani menjelaskan bahwa perkataan al-falah dalam kosa kata al-

---

[13] Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. h. 1-2.

[14] Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, h. 37.

[15] Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*,h. 1.

Qur‟an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat.

Dalam pada itu, al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun di atas empat penyangga; (a) kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, (b) berkecukupan tanpa mengalami kefakiran, (c) kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan (d) pengetahuan tanpa mengalami kebodohan, sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat, sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur‟an (QS. Al-Ankabut : 64)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌۗ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui (QS. Al-Ankabut : 64).[16]

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.[17] Kesejahteraan yang dibangun al-Qur‟an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya (1) kebutuhan fisik-psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan emosi (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini, memiliki dimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif, dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti padapemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat.

---

[16]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya, Halim, 2014), h. 398

[17]M. Umer Chapra, *Islam Pembangununan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 6.

d. Pengertian Kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam

Istilah falah berasal dari bahasa arab dari kata aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Falah, adalah kehidupan yang mulia dan kesejahteraan didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat memberikan dampak yang disebut maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: (1) agama (ad-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal (aql). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak terpenuhi, agar manusia dapat hidup bahagia didunia dan akhirat. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Kesejahteraan dalam islam adalah sebagai berikut:

1) Terpenuhi Kebutuhan Lahiriyah

   Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur’an adalahmenyembah tuhan (Allah), yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar manjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang khalik.

2) Menghilangkan lapar

   Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, jadi ditegaskan bahwa rizki merupakan pemberian dari Allah SWT.

3) Menghilangkan rasa takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indicator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Jika masih banyak tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan atau kriminal lainnya maka dapat diindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Selain ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengancara istiqomah dalam keimanan. karena yang memberikan ketenanganyang hakiki hanyalah Allah SWT.

Komitmen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilanmenurut semua sumberdaya ditangan manusia sebagai titipan dari Allah dan harus di manfaatan untuk mengaktualisasikan "*maqashid syari"ah"* diantaranya adalah:

a) Pemenuhan kebutuhan pokok
b) Sumberdaya pendapatan yang terhormat.
c) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dimaksud untuk *melihat* sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda-beda. Beberapa karya tulis yang dijadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul	Metodologi penelitian	Hasil
1	Kartiawati (2017)	Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengentasakan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)	Penelitian Lapangan	Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, efektivitas PKH yang di diukur melaluilima indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada duaindikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan olehpihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalammengelola/mengalokasikan dana PKH yang diterima. Sehingga PKH yang sudahberjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalammengentaskan kemiskinan di Kampug Bonglai karena masih

				banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh PKH.
2	Desi Pratiwi (2020)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I belum mensejahterakan RTM. Namun Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam mengurangi beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan bagi lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedaton I masih belum tepat sasaran hal ini terjadi karena pada saat pengusulan calon penerima manfaat PKH tersebut masih tergolong miskin, rentang waktu penerimaan bantuan yang relatif lama sehingga

				masyarakat telah mengalami perkembangan pada sisi ekonomi
3	Mohammad Rizal (2018)	Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteran Masyarakat kabupaten sidorjo	Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil dari analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Program Keluarga Harapan dan kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Harapan menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan nilai 0,944. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi sebesar 0,890. Yang artinya 89% kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dipengaruhi oleh Program Keluarga Harapan dan sebesar 11% kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lain
4	Aprillia Saraswati (2018)	Analisis Pengaruh Program Keluarga	Metodologi kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH)

		Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)		berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga program PKH dapat terlaksana secara efektif.
5	Eny Kusumawati (2019)	Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dalam	Penelitan Lapangan	Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi PKH yang di diukur melalui indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu. Seluruh indikator tersebut terpenuhi. Namun, PKH Desa Soko memang belum merata. Dikarenakan banyaknya jumlah

		Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Soko Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)		masyarakat miskin di Desa Soko dan terbatasnya kuota dari pemerintah untuk Desa Soko. Program Keluarga Harapan (PKH) cukup mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Desa Soko, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa sudah terpenuhi. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful, dalam implementasinya PKH sudah diterapkan secara bertanggung jawab dan sebagai sistem jaminan sosial untuk masyarakat. Namun prinsip keadilan belum terpenuhi, karena PKH belum merata untuk masyarakat Desa Soko.

6	Nurul Indah Sari (2020)	Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan Dan	penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara kurang terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini karena masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penetapan peserta PKH, serta tidak tepat waktu dan tepat jumlah. Kemudian ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping PKH dan peserta PKH antara lain: belum adanya kesadaran dari peserta, kurangnya sosialisasi dari pendamping, dan pencairan bantuan PKH yang sering tidak tepat waktu.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka kerja teoritis merupakan dasar dari keseluruhan proyek penelitian. Di dalamnya dikembangkan, diuraikan dan dielaborasi hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi melalui proses pengumpulan data awal, baik wawancara atau observasi dan juga studi literatur dalam kajian pustaka.

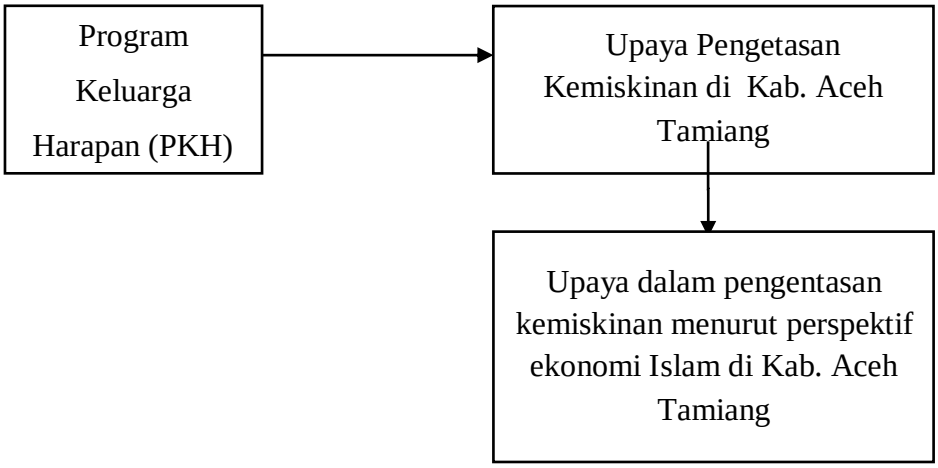

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yan menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.Sedangkan menurut sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang di interpretasikan oleh setiap individu.[1] Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif, tujuannya agar memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Metode deskriptif adalah penilaian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapatan terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.[2]

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan secara terjun langsung ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini terhitung dilakukan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan selesai.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat di berikan data akurat sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang telah terjadi ditempat penelitian tersebut. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah

---

[1] Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4.

[2] Etta Mamang Sengaji, Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), h.

para Masyarakat penerima PKH di Kab. Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini adalah mengambil sampel untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan hanya mengamati sebagian saja dari populasi tersebut.

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan data penerima PKH, dokumen foto, rekaman, dan observasi mendalam oleh peneliti. penelitian ini adalah kata kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data.

2. Data Sekunder

Data sekunder diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.[3]

E. Analisis Data

Analisis adalah proses penyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalampola. Analisis data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka. Kata-kata sering hanya mengandung makna dalam konteks kata itu digunakan. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.[4]

---

[3] Azhari Akmal Tarigan, Dkk, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Medan: La-Tansa Press, 2012), h. 35

[4] Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003). h. 192

Tahapan analisis data menggunakan model miles dan huberman dikutip oleh sugiyono yaitu mencakup reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Adapun tahap analisis data dalam model ini yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan kepada hal yang penting.melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

penyajian merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Oleh karena itu, diperlukan display data. Display data ialah penyajian data dalam bentuk matrik, jaringan dan bagan, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, semua dirancang guna dapat menguasai data yang tersusun dalam suatu yang diraih.

3. Kesimpulan (Verification)

Dalam penelitian kualitatif untuk penarikan kesimpulan tidak tergesa-gesa, akan tetapi penarikan kesimpulan di lakukan secara bertahap dan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.[5]Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

---

[5] Ibid, h. 195

Analisis data interaktif miles dan huberman dapat dilihat pada bagian berikut:

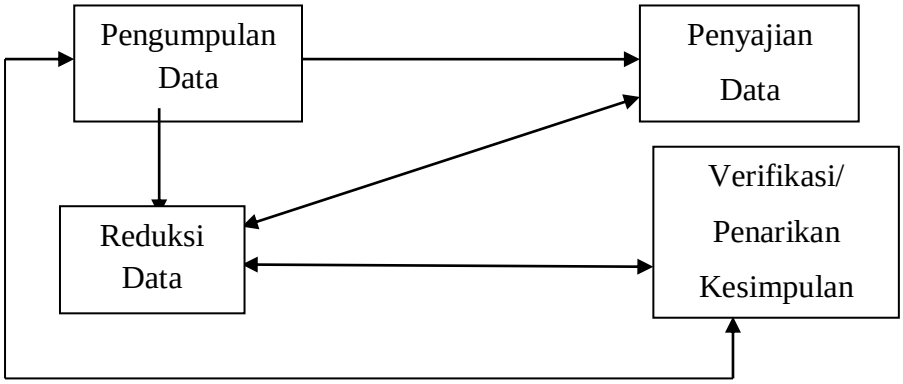

Gambar 3.1

Model Analisis Data

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kab. Tamiang dan Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Letak Geografis Kab. Aceh Tamiang

Batas Daerah Aceh Tamiang

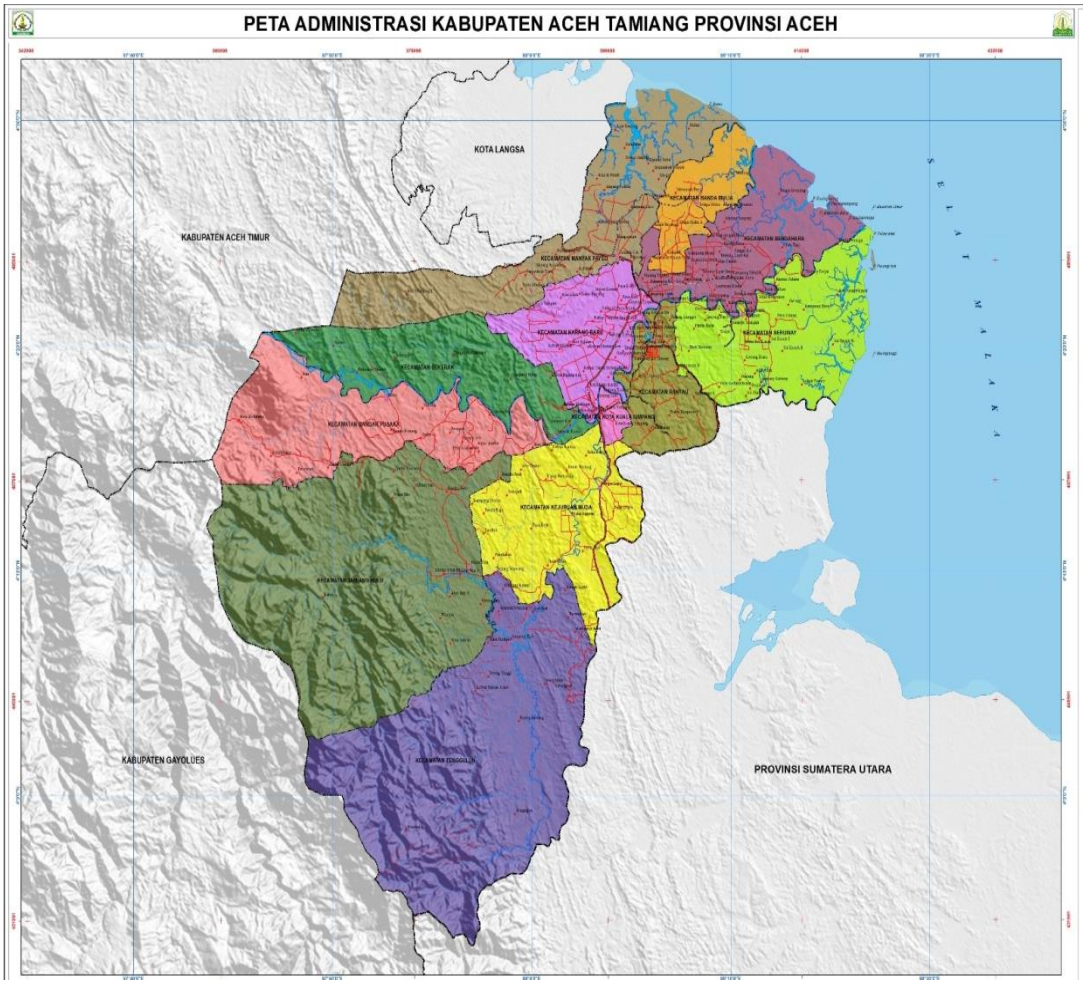

Gambar 4.1 Peta Wilayah Aceh Tamiang

Ibukota Karang Baru Batas Daerah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Kota langsa dan Selat Malaka Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo

Lues Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka

Kabupaten Aceh Tamiang terletak antara 03°53 ‘18,81″ – 04°32′ 56,76″ Lintang Utara dan 97°43′ 41,51″ – 8°14’ 45,41″ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 20 – 700 meter di atas permukaan laut. Pada Tahun 2007, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami pemekaran kecamatan sehingga wilayah administrasi menjadi 12 Kecamatan dan 213 kampung. Batas-batas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.[1]

Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya : sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

2. Ruang Lingkup Keadaan Kab. Aceh Tamiang

a) Penduduk

Adapun populasi penduduk di Kab. Aceh Tamiang mencapai 287 007,00 jiwa.[2]Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Tamiang adalah suku Tamiang (Melayu), suku Tionghoa, suku Aceh, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Indonesia digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagai bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa Melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, hanya beberapa kata dan makna aksen yang sedikit berbeda.

---

[1]http://www.acehtamiangkab.go.id/, di akses pada tanggal 10 februari 2021
[2]*BPS Kab. Aceh Tamiang 2019*

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kota yang strategis dan ramai imigran. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kab. Aceh Tamiang

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Bandar Mulia	6 091,00	5 895,00
2	Bandar Pusaka	6 607,00	6 388,00
3	Bendahara	10 654,00	10 433,00
4	Karang Baru	20 882,00	20 519,00
5	Kejuruan Muda	18 340,00	18 164,00
6	Kota Kuala Simpang	10 478,00	10 287,00
7	Manyak Payed	16 589,00	16 191,00
8	Rantau	18 971,00	10 287,00
9	Sekerak	3 435,00	3 389,00
10	Seruway	13 606,00	13 475,00
11	Tamiang Hulu	9 960,00	9 705,00
12	Tenggulun	9 313,00	8 897,00

Sumber : BPS Kab. Aceh Tamiang 2019

b) Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan Negara.

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab siswa dan tenaga pendidikan saja tetapi juga orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi Negara-negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan seperti siswa, guru, proses belajar-mengajar, manajemen, layanan pendidikan serta sarana penunjang lainnya harus terkoordinasi dan bekerjasama dengan baik.

Dalam hal ini akan dilihat bagaimana sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kab. Aceh Tamiang. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Kab. Aceh Tamiang

No.	Tingkat pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah Sekolah
1	Taman Kanak-Kanak	12	134	143
2	Raudhatul Athfal	-	40	40
3	Sekolah Dasar	156	8	164
4	Madrasah Ibtidaiyah	10	12	22
5	Sekolah Menengah Pertama	48	9	57
6	Madrasah Tsanawiyah	3	20	23
7	Sekolah Menengah Umum	21	6	27
8	Sekolah Menengah Kejuruan	5	3	8
9	Madrasah Aliyah	2	10	12

Sumber : BPS Kab. Aceh Tamiang 2019

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa prasarana penunjang pendidikan di Kab. Aceh Tamiang cukup baik untuk menunjang pendidikan masyarakat yang berdomisili di Kab. Aceh Tamiang.

c) Kesehatan

Untuk fasilitas kesehatan masyarakat Kab. Aceh Tamiang memiliki prasarana seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

No	Nama Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskemas pembantu	Polindes	Posyandu	Poli Klinik	Praktek Dokter	Praktek Bidan	Apotik/Toko Obat
1	Tamiang Hulu	-	1	3	10	20	-	1	-	1
2	Bandar Pusaka	-	1	4	15	16	-	3	-	-
3	Kejuruan Muda	-	1	3	17	35	3	7	-	1
4	Tenggulun	-	1	2	9	14	2	4	1	1
5	Rantau	1	2	2	16	23	2	13	7	2
6	Kota Kuala Simpang	-	1	-	3	11	4	14	2	5
7	Seruway	-	1	5	21	28	-	2	-	4
8	Bendahara	-	2	3	28	35	-	6	1	5
9	Banda Mulia	-	1	3	9	12	-	1	-	-
10	Karang Baru	1	1	4	25	41	4	39	1	2
11	Sekerak	-	1	2	12	15	-	2	-	-
12	Manyak payed	-	1	3	31	41	2	23	1	7

Sumber: Data primer yang diolah: 2019

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Aceh Tamiang

a. Sejarah PKH di Kab. Aceh Tamiang

Berdasarkan kemiskinan di kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini membuktikan bahwa bentuk program pemerintah belum berjalan sesuai maksimal termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), oleh sebab itu keefektifan suatu program penangguulangan kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. PKH di kabupaten Aceh Tamiang sudah berlangsung sejak tahun 2013, dimana penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Berikut ini adalah data penerimaan PKH di kabupaten Aceh Taming

Tabel 4.4

Penerimaan PKH di Kabupaten Aceh Tamiang per Kecamatan

No	Nama Desa	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Banda Mulia	172	174	230	798	784
2	Bandar Pusaka	156	155	518	1064	1042
3	Bendahara	187	187	585	1259	1226
4	Karang Baru	528	524	1016	2687	2419
5	Kejuruan Muda	333	331	742	1564	1473
6	Kota Kuala Simpang	137	137	265	861	819
7	Manyak Payed	629	625	1394	2509	2400
8	Rantau	265	266	622	1541	1469
9	Sekerak	113	110	250	454	422
10	Seruway	446	440	920	1842	1691
11	Tamiang Hulu	94	92	217	905	861
12	Tenggulun	297	289	527	991	936
Jumlah		3357	3330	7286	16466	15542

Sumber data dinas sosial Kab. Aceh Tamiang 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan PKH di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penerimaan PKH, oleh karena itu maka keefektifan program PKH di Kabupaten Aceh Tamiang perlu dilakukan penelitian, apakah dengan adanya penyaluran PKH di Kabupaten Aceh Tamiang dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi selama ini.

b. Implementasi PKH di Kab. Aceh Tamiang

Program Keluarga Harapan yang ada Kab. Aceh Tamiang sudah berlangsung terhitung sejak tahun 2013, fakta yang ditemukan di lapangan adalah implementasi PKH tersebut masih belum sesuai dengan kriteria penetapan RTM penerima bantuan seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan peserta PKH yang di kategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai penerima bantuan tersebut. Bahkan banyak peserta penerima bantuan yang telah terdaftar selama lebih dari lima tahun.

Definisi implementasi sering berubah-rubah dengan banyaknya perkembangan implementasi itu sendiri, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.[1]

1. Karakteristik Informan

Pada bagian ini karakteristik informan yang akan dibahas yaitu mulai dari usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kab. Aceh Tamiang dengan jumlah informan sebanyak 50 orang.

a. Usia Informan / Narasumber

Adapun usia narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

[1] Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

Tabel 4.5 Data Informan Berdasarkan Usia

No.	Usia Informan	Jumlah	Persentase
1	21-35 Tahun	12	24%
2	36-46 Tahun	27	54%
3	>47	11	22%
Total		**50**	**100%**

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah informan yang berusia 21-35 tahun sebanyak 12 orang atau 24%, kemudian informan yang berusia 36-46 tahun sebanyak 27 orang atau 54 %, sedangkan sebanyak 11 orang atau 22% merupakan narasumber yang berusia >47 tahun.

b. Berdasarkan Pekerjaan Informan

Pekerjaan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Informan	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	38	76%
2	SPetani	-	-
3	Buruh	4	8%
4	Pedagang	8	16%
Jumlah		**50**	**100%**

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 38 orang atau 76% informan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebanyak 4 orang 8% bekerja sebagai buruh, dan 8 orang atau 16% menjadi pedagang.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Informan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	6	12%
2	SMP	12	24%
3	SMA	32	64%
Total		**50%**	**100%**

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa informan dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 6 orang atau 12%, selain itu informan dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 24%, dan informan dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 32 orang atau 64%.

d. Karakteristik Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data tentang jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8

Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase%
Laki-laki	**6**	**12%**
Perempuan	**44**	**88%**
Jumlah	**50**	**100%**

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang (12%) dan respondden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 44 orang (88%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan terbanyak dengan jumlah 44 orang (88%).

e. Profil Informan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti menemukan berapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Dalam

penelitian yang peneliti lakukan terhadap lima puluh (50) orang masyarakat di Kab. Aceh Tamiang. Berikut data informan yang peneliti dapatkan.

Tabel 4.9

Profil Informan Masyarakat Kab. Aceh Tamiang

No.	Nama Informan/Inisial	Nama Desa Informan
1	NR	Sriwijaya
2	DS	Sriwijaya
3	TR	Sriwijaya
4	MI	Kota Lintang
5	DL	Kuala Simpang
6	AM	Perdamaian
7	NZ	Perdamaian
8	NR	Bukit Tempurung
9	RM	Bukit Tempurung
10	FR	Dalam
11	SK	Dalam
12	BN	Dalam
13	SD	Dalam
14	SB	Dalam
15	MS	Dalam
16	UL	Dalam
17	NI	Dalam
18	ST	Dalam
19	NT	Dalam
20	PR	Kesehatan
21	ER	Alur Bemban
22	RS	Alur Bemban
23	SF	Alur Bemban
24	WG	Alur Bemban
25	TS	Alur Bemban

26	YS	Alur Bemban
27	AS	Alur Bemban
28	KF	Alur Bemban
29	SF	Alur Bemban
30	SS	Alur Bemban
31	DA	Bukit Keranji
32	SL	Bukit Keranji
33	KR	Bukit Keranji
34	WN	Bukit Keranji
35	NT	Bukit Keranji
36	SM	Bukit Keranji
37	SP	Bukit Keranji
38	SW	Bukit Keranji
39	LW	Bukit Keranji
40	SL	Bukit Keranji
41	AD	Menanggini
42	TK	Menanggini
43	LL	Menanggini
44	NG	Menanggini
45	HL	Menanggini
46	MJ	Menanggini
47	TM	Menanggini
48	EW	Menanggini
49	MN	Menanggini
50	CH	Menanggini

Sumber data: Hasil Riset 2021

2. Pelaksanaan Wawancara Kepada Informan

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara terjun kelapangan terhadap 50 orang informan kunci yang dilakukan di Kab. Aceh

Tamiang. Informan yang berhasil diwawancarai secara intensif dengan nama menggunakan inisial, yaitu SL, SD, DS, RM dan lain-lain.

Wawancara dengan informan dengan inisial SL dan DS dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Februari 2021 informan dengan inisial SD dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Februari 2021, informan dengan inisial NR dan RM dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Februari 2021, Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara kusioner yang dilakukan rentang waktu pada bulan Februari.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan keempat informan penelitian pada hari, waktu dan tempat yang berbeda dimulai dari :

Hari kamis, 11 februri 2021 di rumah Ibu TR yang beralamat di Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara dimulai pukul 10.15 WIB s/d 10.45 WIB dengan informan pertama yaitu, Ibu TR.

Hari Sabtu, 13 februari 2021 di ruang keluarga rumah ibu MS dan NR yang beralamat di Desa dalam Kecamatan karang baru Kabupaten Aceh Tamiang. Wawancara dimulai pukul 10.00 WIB s/d 10.30 WIB dengan informan kedua yaitu, Ibu MS dan NR.

3. Bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Kab. Aceh Tamiang

Penduduk miskin hidup tanpa adanya kebebasan pokok dan pilihan yang lebih baik. Mereka sering kali tidak cukup dalam hal makanan dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan, perbedaan dalam rasa aman seperti layaknya orang hidup. Mereka juga rentan terhadap penyakit, dan ekonomi yang buruk. Masyarakat miskin seringkali mendapatkan perlakuan buruk oleh Negara dan kurangnya kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.[2] Ada empat bentuk kemiskinan, diantaranya adalah:

a. Kemiskinan Pendapatan

Kemiskinan pendapatan adalah seseorang dikatakan miskin jika dan hanya pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan

[2] World bank, Global Development finance, 1998 (Washington,Dc, World 1998)

sebagai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan khususnya makan.

b. Kemiskinan Manusia

Kemiskinan manusia diartikan dengan menggambarkan melalui tiga perspektif kemiskinan-pendapatan, kebutuhan dasar dan kapabilitas dan merumuskannya dalam satu indeks kemiskinan manusia, yakni: tingkat umur, pengetahuan, dan standar hidup layak.

c. Kemiskinan Kebutuhan Dasar

Kemiskinan kebutuhan dasar yaitu kemiskinan yang merupakan ketiadaan kebutuhan material untuk mencukupi kebutuhan minimal hidup termasuk makan.

d. Kemiskinan Kemampuan yaitu kemiskinan kapabilitas yang merupakan tidak adanya kemampuan dasar untuk berfungsi sebagai manusia karena tidak adanya kesempatan untuk mencapainya.[3]

Pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan modal manusia merupakan alternatif efektif. Hal ini karena mengedepankan pembangunan kapasitas manusia dan diimbangi dengan pengembangan dimensi-dimensi pemberdayaan yang terkait dengan kemiskinan. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah umumnya menggunakan pendekatan ekonomi.[4]

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan terbatas nya lapangan kerja yang memadai membuat masalah pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Lambatnya penanganan pemerintah dalam menyikapi masalah ini, membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, salah satunya adalah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk warganya. Jika pemerintah dapat bergerak cepat, tidak mustahil masalah pengangguran yang ada di

---

[3] Yani Afdillah, Isnaini Harahap, Marliyah. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, h . 52.

[4] Mohammad Armoyo, *Citizen Carter Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, dalam jurnal Human Fallah, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014. h. 5

Indonesia ini akan teratasi. Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu,pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7 hingga 8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. [5]

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan Ibu SL salah satu peserta penerima PKH di Desa Dalam Kecamatan Karang Baru mengatakan bahwa: "*Dengan adanya tanpa potongan dari bantuan PKH yang Ibu terima saya dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk membeli peralatan pendidikan untuk sekolah anak Ibu".*[6]

Gambar 4.1 Wawancara Kepada Ibu SL

Adapun dari informan Ibu SD salah satu peserta penerima PKH di Desa Dalam Kecamatan Karang Baru menyatakan bahwa: "*Hampir dari seluruh dusun rukun dapat merasakan bantuan PKH dengan tepat sasaran dengan adanya sosialisasi dari pendamping PKH*.[7]

---

[5] Imsar, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016,*dalam jurnal Human Fallah, Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018, h. 146

[6] Ibu SL, Masyarakat desa dalam, wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021

[7] Ibu SD Masyarakat desa dalam, wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 13 februari 2021

Kemudian beliau menyatakan bahwa bantuan PKH ini membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan di keluarga kami.

Gambar 4.2 Wawancara Kepada Ibu SD

Wawancara kepada informan kepada Ibu DS warga di Desa Sriwijaya Kecamatan kota Kuala Simpang menyampaikan bahwa: *"Nenek melihat bahwa masih adanya kurang tepat sasaran dikarenakan masih ada diantara tetangga Nenek yang harusnya menerima PKH akan tetapi disayangkan tidak menerimanya bantuan tersebut".*[8]

[8] Ibu DS, Masyarakat Desa Sriwijaya, Wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021

Gambar 4.3 Wawancara Kepada Ibu DS

Wawancara kepada informan kepada Ibu RM warga di Desa Bukit Tempurung Kecamatan kota Kuala Simpang menyampaikan bahwa: *"Menurut ibu besarnya bantuan PKH ini memadai untuk menyekolahkan anak saya dari pada itu dikeluhkan dengan adanya kalimat di dalam Stiker/Plank dengan kalimat sangat miskin".*[9]

[9] Ibu RM, Masyarakat Desa Bukit Tempurung, Wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021

Gambar 4.4 Wawancara Kepada Ibu RM

Dari beberapa jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan sudah dapat membantu dan berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga yang menerima bantuan tersebut. Dimana para menerima sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan PKH yang mereka terima selama ini. Adapun dampak yang dirasakan penerima yaitu, Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Meringankan biaya pendidikan, dan balita dengan demikian, program PKH dapat membantu penerima untuk meringankan biaya kehidupan sehari-hari.

Sekenario bantuan yang diterapkan selama ini belum mencerminkan adanya keadilan. Sehingga bantuan yang dikucurkan sering menimbulkan kesenjangan antar peserta PKH dengan komposisi anggota rumah tangga dan beban pendidikan yang berbeda-beda. Peserta PKH yang mempunyai anak balita lebih dari satu dan yang mempunyai anak yang masih sekolah dibangku SD, SMP, SMA masih merasakan bahwa jumlah bantuan keuangan PKH belum mencukupi sehingga belum maksimal atau belum mencukupi sehingga tidak bisa bisa membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya secara signifikan.

4. Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Dalam Kajian Ekonomi Islam di Kab. Aceh Tamiang

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan ahlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat.

Islampun memandangnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengatasi kemiskinan digunakan dan diterapkan sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Berusaha dan bekerja
2) Larangan menumpuk harta
3) Zakat
4) Hukum waris
5) Ghanimah
6) Hemat.

Namun seiring berkembangnya zaman tentu dari keenam poin yang masih relevan untuk diterapkan hanya 5 poin karena saat ini konsep ghanimah sudah tidak ada lagi.[10]

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan sebuah ironi, apalagi negara ini merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah hingga sekarang sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Ketidakseriusan terhadap penanganan nasib dan masa depan puluhan juta penduduk miskin di tanah air ini merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Prinsip ajaran Islam adalah membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kehidupan yang layak dan berkecukupan. Alqur'andan Hadis menekankan agar setiap manusia bekerja secara produktif, mengolah kekayaan sumber alam agar menjadi sumber ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Dan Allah tidak memberikan rezki kepada manusia dalam bentuk jadi tanpa perlu diusahakan dan siap digunakan, tetapi Allah telah menjadikan alam ini untuk digarap dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kemakmuran manusia.

---

[10] Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk., Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 25

Dari kaidah-kaidah kepemilikan perspektif Islam, prinsip dasar ekonomi Islam dapat diformulasikan antara lain:

1) **Kebebasan Individu**. Manusia diberi kebebasan untuk memutuskan suatu hal yang dianggap perlu selama tidak merugikan pihak lain.
2) **Larangan Menimbun Kekayaan**. Islam melarang keras adanya praktek ihtikar atau penimbunan kekayaan yang bertujuan supaya terjadi kelangkaan barang sehingga terjadi kenaikan harga hingga meraup keuntungan demi kepentingan pribadinyA**.**
3) **Persamaan Tingkat Sosial**. Kesamaan tingkat sosial sangat didukung dalam ajaran Islam sehingga kekayaan tidak dinikmati sekelompok masyarakat tertentu dan pada yang bersamaan setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk berusaha.
4) **Jaminan Sosial**. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan Negara menjamin untuk mendapatkan kebutuhannya**.**
5) **Distribusi Kekayaan Secara Meluas**. Sistem ekonomi Islam melarang menumpuk kekayaan pada kelompok tertentu tetapi harus didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimannya (mustahiq).
6) **Perbedaan Dalam Batas Yang Wajar**. Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara manusia namun bukan berarti membiarkannya begitu saja melainkan berupaya agar ketidaksamaan tingkat ekonomi tetap dalam batas kewajaran.
7) **Kesejahteraan Bersama**. Ajaran Islam meletakkan dasar bahwa kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat berjalan bersama, seiring dan saling melengkapi, bukan saling bersaing dan bertentangan. Sistem ekonomi Islam berupaya meminimalisir kemungkinan timbulnya konflik dan mengatur agar terwujudnya saling memberi manfaat.[11]

Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini dan membuat jumlah penduduk miskin bertambah banyak. menjadi suatu masalah yang harus dicari solusinya. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk yang

[11] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h. 35-36.

hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena masalah kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (over population), akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil.[12]

Berdasarkan wawancara kepada informan Ibu TR salah satu penerima PKH di Desa Sriwijaya Kecamatan Kuala Simpang menyatakan bahwa *"Ibu melihat sosialisasi penguatan komitmen dalam sosialisasi PKH sebagai acuhan untuk menjaga kesehatan anak balita ke posyandu yang mana anak merupakan salah satu titipan amanah dari Allah Swt"*.[13]

Gambar 4. 5 Wawancara Kepada Ibu TR

[12] Zuhrinal M. Nawawi, "*Kecenderungan Masyarakat Untuk Berwakaf Tunai (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara"* dalam jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli-Desember 2011, h. 216-217

[13] Ibu TR, Masyarakat desa Sriwijaya, wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021

Adapun dari informan Ibu MS salah satu peserta penerima PKH di Desa Dalam Kecamatan Karang Baru menyatakan bahwa: *"Tahapan pelaksanaan PKH ini memberikan informasi kepada saya melalui pendamping dalam bantuan PKH untuk anak saya yang menyandang disabilitas yaitu bantuan tunai dan non tunai membantu dalam kesehatan anak saya".*[14]

Gambar 4. 6 Wawancara Kepada Ibu MS

Adapun wawancara kepada informan kepada Ibu NR selaku warga desa bukit tempurung kecamatan kota kuala simpang beliau menyatakan bahwa: *"Kegunaan dari pembentukan kelompok penerima PKH sangatlah baik karena dapat menambah wawasan cara mendidik anak"*[15]

[14] Ibu MS, Masyarakat desa dalam, Wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021

[15] Ibu NR, Masyarakat desa dalam, Wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021

Gambar 4. 7 Wawancara Kepada Ibu NR

Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan tentang Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang) dilakukan Wawancara di Kab. Aceh Tamiang. sejak adanya Program Keluarga Harapan terbukti lebih mensejahterakan para peserta penerima PKH. Mereka juga berharap agar PKH terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi keluarga miskin khususnya untuk membiayai anak balita dari masyarakat penerima juga mencukupi kebutuhan kesehatan bagi penerima PKH.

Dengan demikian, proses sosialisasi telah dilakukan dengan baik dan benar secara rutin oleh pihak Dinas Sosial mengenai tujuan dari PKH. Para pendamping PKH juga senantiasa menginformasikan kepada penerima tentang waktu pencairan bantuan PKH tersebut, dan rutin melakukan pertemuan dengan penerima PKH.

Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan social harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Tepat waktu merupakan jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan program PKH proses pencairan dana bantuan harus dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut. Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan sosial yang diberikan setiap tiga bulan sekali kepada masing masing peserta PKH.

Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan sosial harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Aceh Tamiang terbagi atas kesehatan dan pendidikan. Diantaranya ibu hamil, anak usia dini (Balita), anak sekolah SD, SMP, SMA, disabilitas berat dan lanjut usia. Dimana para menerima sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan PKH yang mereka terima selama ini. Adapun dampak yang dirasakan penerima yaitu, Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Meringankan biaya pendidikan, dan balita dengan demikian, program PKH dapat membantu penerima untuk meringankan biaya kehidupan sehari-hari. Sehingga bantuan yang dikucurkan sering menimbulkan kesenjangan antar peserta PKH dengan komposisi anggota rumah tangga dan beban pendidikan yang berbeda-beda.
2. Berdasarkan hasil analisis Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan menurut Kajian ekonomi Islam di Kab. Aceh Tamiang Menurut hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di lapangan tentang Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Kab. Aceh Tamiang) dilakukan Wawancara di Kab. Aceh Tamiang. sejak adanya Program Keluarga Harapan terbukti lebih mensejahterakan para peserta penerima PKH. Mereka juga berharap agar PKH terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi keluarga miskin baik dalam kesehatan maupun pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai evaluasi Bagi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang dalam analisis implementasi PKH dalam pengentasan kemiskinan menurut kajian ekonomi Islam. Anggararan PKH salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan program ini sangat membantu terutama dalam pendidikan harusnya pemerintah lebih gencar menjalankan program ini. Agar masyarakat miskin yang kurang mampu dalam pendidikan dapat menempuh sekolah dan harusnya dana program ini harus lebih di tingkatkan lagi untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupatan Aceh Tamiang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Erwan. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991).

An-Nadhlah, Mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: PT. Hati Mas).

Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

BPS Kab. Aceh Tamiang 2019

Chapra, M. Umer. *Islam Pembangununan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Penerbit : J-ART, 2010).

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan(PKH)*.

Etta Mamang Sengaji, Sopiah. Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010).

Harahap, isnaini. Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisiplinder, (Medan: Perdana Publishing, 2018).

Harahap, Isnaini. Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi

Irfan Syauqi, Irfan. *Ekonomi Pembangunan Syari'ah, Edisi Revisi,* (Jakarta:PT Grafindo Persada,2016).

Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya, Halim, 2014), h. 541.

Khomsa, Ali. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin.*

Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*.

Qardhawi, 2005 dalam Nurul Huda dkk., Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2015).

Rahmani, Nur Ahmadi Bi. Metodologi Penelitian Ekonomi, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016).

Shihab, Muhammad Qurasih *Tafsir AL Qur'an*.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018).

Suprayogo, Imam. Metodologi Penelitian Sosial-Agama,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003).

Tarigan, Azhari Akmal. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Medan: La-Tansa Press, 2012).

Jurnal

Imsar, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016*,dalam jurnal Human Fallah, Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018.

Ikfa Nurul Faudah, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baitul Maal KSPPS Binama KC Tlogosari*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:2018) h.6.

Mohammad Armoyo, *Citizen Carter Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan,* dalam jurnal Human Fallah, Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014.

Nuewati, Nunung. *Kemiskinan:Model Pengukuran, Pemasalahan dan Alternatif Kebijakan.*Jurnal (Kependudukan Padjadjaran 2018 Vol. 10,No. 1).

Sri Budi Cantika Yuli, "*Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam*", (Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.2, Juli 2013), 108-109.

Ahmadi, Rulan. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan osko 100 di Kota Surabaya),* Jurnal Administrasi Publik Vol. 10, No.2 (Desember 2012).

Utomo, Dedy. Abdul Hakim, Heru Ribawanto.*Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin.* Jurnal (Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1.

Zuhrinal M. Nawawi, "*Kecenderungan Masyarakat Untuk Berwakaf Tunai (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara"* dalam jurnal Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli-Desember 2011.

Webite

World bank, Global Development finance, 1998 (Washington,Dc, World 1998).

www.kemsos.go.id, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.08 WIB.

www.kemsos.go.id, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.08 WIB.

TNP2K, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Kartiawati,"*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Persepktif Ekonomi Islam*".

TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di:http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/, (diakses pada 02 Oktober 2020).

TNP2K, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)* 2019.

http://www.acehtamiangkab.go.id/, di akses pada tanggal 10 februari 2021.

Wawancara

Ibu DS, Masyarakat Desa Sriwijaya, Wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021 jam 10:15 WIB.

Ibu MS, Masyarakat desa dalam, Wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 13 februari 2021 jam 10:00 WIB.

Ibu NR, Masyarakat desa dalam, Wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 13 februari 2021 Jam 10:35 WIB.

Ibu RM, Masyarakat Desa Bukit Tempurung, Wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021 jam 10:45 WIB.

Ibu SD Masyarakat desa dalam, wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021 jam 10:25 WIB.

Ibu SL, Masyarakat desa dalam, wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021 jam 11:00 WIB.

Ibu TR, Masyarakat desa Sriwijaya, wawancara di Kab. Aceh Tamiang, Tanggal 11 februari 2021 jam 11:15 WIB.

LAMPIRAN

Foto Wawancara

KELUARGA SANGAT MISKIN
PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH)

KELUARGA SANGAT MISKIN
PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH)

PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH)

Standard
Chartered

DAFTAR KUESIONER

Respon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap
Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Aceh Tamiang

1. Petunjuk Pengisian
   a. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh alternative jawabannya.
   b. Pilihlah alternative jawaban yang paling sesuai menurut anda.
   c. Jawablah pertanyaan tersebut dengan cara menyilangi salah satu jawaban yang menurut Ibu benar.
   d. Peneliti sangat Mengharapkan semua pertanyaan dijawab denga jujur, benar, dan jelas.
   e. Berikan penjelasan terhadap jawaban yang dipilih.
2. Identitas Responden
   a. Nama:
   b. Usia:
   c. Jenis Kelamin
      1. Laki-laki
      2. Perempuan
   d. Agama
      1. Islam
      2. Khatolik
      3. Protestan
      4. Budha
      5. Hindu
   e. Suku
      1. Aceh
      2. Jawa
      3. Melayu
      4. Lainnya, sebutkan…

f. Pendidikan Terakhir
   1. Tidak Sekolah
   2. Tamat SD
   3. Tamat SLTP/Sederajat
   4. Tamat SLTA/Sederajat
   5. Diploma
   6. Sarjana

g. Pekerjaan
   1. Buruh
   2. Petani
   3. Pedagang
   4. Ibu Rumah tangga
   5. Lainnya, sebutkan…

h. Jumlah anak
   1. 1 orang
   2. 2 orang
   3. 3 orang
   4. Lebih dari 3 orang, sebutkan…

3. Karakteristik Jawaban Responden

Respon Peserta PKH Terhadap Pelaksaan PKH dapat dilihat melalui:

A. Persepsi
   1. Apakah Ibu tahu mengenai Program Keluarga Harapan ini?
      a. Tahu
      b. Kurang Tahu
      c. Tidak Tahu

      Alasan:
   2. Apakah Ibu tahu manfaat Program Keluarga Harapan?
      a. Tahu
      b. Kurang Tahu
      c. Tidak Tahu

      Alasan:

3. Apakah ibu tahu tujuan dari Program Keluarga Harapan?
   a. Tahu
   b. Kurang Tahu
   c. Tidak Tahu

   Alasan:
4. Apakah Ibu Tahu Di Kab. Aceh Tamiang Ada Program Keluarga Harapan?
   a. Tahu
   b. Kurang Tahu
   c. Tidak Tahu

   Alasan:
5. Apakah Ibu tahu di Kab. Kab. Aceh Tamiang Sebelumnya Pernah dilaksanakan Program Pemerintah yang lain selain Program Keluarga Harapan?
   a. Tahu
   b. Kurang Tahu
   c. Tidak Tahu

   Alasan:
6. Dari mana ibu memperoleh Informasi mengenai Program Keluarga Harapan?
   a. Pihak Kecamatan
   b. Iklan atau Sosialisasi
   c. Tetangga/Teman

   Lainnya, sebutkan…
7. Apakah informasi yang ibu peroleh dapat ibu pahami?
   a. Paham
   b. Kurang Paham
   c. Tidak Paham

   Alasan:

8. Apakah Ibu tahu adanya Tim Program Keluarga Harapan untuk menginformasikan Program Keluarga Harapan di Kab. Aceh Tamiang?
   a. Tahu
   b. Kurang Tahu
   c. Tidak Tahu

   Alasan:

B. Sikap

9. Bagaimana penilaian ibu atas adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini?
   a. Baik
   b. Kurang Baik
   c. Tidak Baik

   Alasan:

10. Bagaimana tanggapan ibu atas informasi sosialisasi adanya Program Keluarga Harapan?
    a. Baik
    b. Kurang Baik
    c. Tidak Baik

    Alasan:

11. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kelanjutan Program Keluarga Harapan?
    a. Setuju dilanjutkan
    b. Kurang Setuju dilanjutkan
    c. Tidak setuju dilanjutkan

    Alasan:

12. Bagaimana Tanggapan Ibu Terhadap bantuan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat?
    a. Suka
    b. Kurang Suka
    c. Tidak suka

Alasan:

13. Bagaimana tanggapan ibu mengenai adanya sosialisasi untuk menginformasikan adanya Program Keluarga Harapan Kepada KSM/RTSM sasaran penerima manfaat program?
    a. Baik
    b. Kurang Baik
    c. Tidak Baik

    Alasan:
14. Bagaimana tanggapan ibu tentang besarnya dana bantuan Program Keluarga Harapan, apakah besarnya dana bantuan tersebut sudah memadai?
    a. Memadai
    b. Kurang memadai
    c. Tidak memadai

    Alasan:
15. Bagaimana penilaian ibu, Apakah dana Program Keluarga Harapan sudah tepat sasaran?
    a. Tepat sasaran
    b. Kurang Tepat Sasaran
    c. Belum Tetap Sasaran

    Alasan:
16. Menurut ibu, apakah ibu menerima bantuan Program Keluarga Harapan tepat pada waktunya?
    a. Tepat Waktu
    b. Kurang Tepat Waktu
    c. Tidak Tepat Waktu

    Alasan:
17. Bagaimana tanggapan ibu, Apakah penyaluran dana Program Keluarga Harapan sudah Berjalan dengan baik?
    a. Baik
    b. Kurang Baik

c. Tidak Baik

Alasan:

18. Menurut ibu, apakah petugas pelaksanaan PKH sedah menjalankan tugasnya dengan baik?
    a. Sudah Baik
    b. Kurang Baik
    c. Tidak Baik

    Alasan:

19. Apakah ibu mendapatkan pelayanan yang baik pada saat pemberian kartu pesera PKH ataupun pada saat penyaluran dana PKH?
    a. Baik
    b. Kurang baik
    c. Tidak baik

    Alasan:

20. Sejauh ini bagaimana tanggapan Ibu tentang pelaksanaan di Kab. Aceh Tamiang?
    a. Baik
    b. Kurang Baik
    c. Tidak menikmati

    Alasan:

C. Partisipasi

21. Apakah ibu ikut serta dalam menikmati hasil Program keluarga Harapan?
    a. Menikmati
    b. Kurang Menikmati
    c. Tidak Menikmati

    Alasan:

22. Apakah petugas Pemerintah/Pihak TIM pelaksanaan Program Keluarga Harapan pernah memberikan penyuluhan/sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan?

a. Pernah
b. Kadang-kadang
c. Tidak Pernah

Alasan:

23. Apakah ibu ikut serta dalam musyawarah di kab Aceh Tamiang sebelum Program Keluarga Harapan?
    a. Pernah
    b. Kadang-kadang
    c. Jarang

    Alasan:

24. Apakah ibu pernah ikut serta dalam pertemuan kelompok yang diadakan oleh petugas Program Keluarga Harapan?
    a. Pernah
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak Pernah

    Alasan:

25. Apakah ibu pernah ikut serta dalam sosialisasi penguatan komitmen yang dilaksanakan 3 bulan sekali oleh petugas pelaksanan Program Keluarga harapan?
    a. Pernah
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak Pernah

    Alasan:

26. Apakah ibu pernah membawa anak balita ibu ke posyandu?
    a. Pernah
    b. Kadang-kadang
    c. Tidak Pernah

    Alasan:

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tahapan dari pelaksanaan PKH ini? Dan apakah sudah berjalan dengan baik?
2. Siapa –siapa saja yang menerima PKH ini? Dan bapak/Ibu sudah tepat sasaran?
3. Apakah besar bantuan yang diterima peserta PKH sesuai dengan yang telah ditentukan atau ada potongan?
4. Seperti apa dampak atau manfaat dari PKH ini terhadap penerimanya?
5. Apakah pelaksanaan PKH ini Sudah efektif dijalankan?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan PKH ini? Dan Apakah pihak-pihak terlibat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?
7. Bagaimana dan seperti apa sosialisasi terhadap masyarakat penerima PKH di Kab. Aceh Tamiang?
8. Menurut Bapak/Ibu , apa kegunaan dari pembentukan Kelompok ibu pemenerima PKH? Dan apakah telah berfungsi dengan baik?
9. Menurut Bapak/Ibu, Seperti apa sikap pelaksanaan PKH menyikapi keluhan masyarakat ataupun permasalahan terkait Program ini?
10. Bagaimana menurut bapak/ibu komitemen peserta PKH terkait kewajibannya yang telah diatur dalam ketentuan PKH?

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476
Telp/Fax (0641) 332388, e-mail dinsos@acehtamiangkab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 072/ 2336 /2020

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-5423/EB.I/KS.02/11/2020 Tanggal 01 Desember 2020 Perihal Izin Riset, maka dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: **MUHAMMAD RINALDI**
NIM	: 0501163203
Tempat/Tanggal Lahir	: Desa Dalam, 10 Desember 1997
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Penelitian	: **Analisis Pengaruh Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengetasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomis Islam (Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)**
Lokasi Penelitian	: Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini diberikan untuk kegiatan mencari dan mengumpulkan data untuk bahan laporan akhir karya ilmiah dan tidak digunakan untuk kepentingan lainnya.
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang
3. Mematuhi Protokol Kesehatan selama pengumpulan data guna Pencegahan Penyebaran Corona Virus (Covid-19)
4. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat izin akan dicabut.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada para pihak yang berkaitan dengan kegiatan ini agar dapat memberikan dukungan atau bantuan seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud.

Karang Baru, 3 Desember 2020
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MUHAMMAD ALIJON, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor B-5423/EB.I/KS.02/11/2020 01 Desember 2020
Lampiran -
Hal **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	**: Muhammad Rinaldi**
NIM	**: 0501163203**
Tempat/Tanggal Lahir	**: Desa Dalam, 10 Desember 1997**
Program Studi	**: Ekonomi Islam**
Semester	**: IX (Sembilan)**
Alamat	**: desa dalam kabupaten aceh tamiang Kecamatan karangbaru**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul ***Analisis Pengaruh Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengetasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang).***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Medan, 01 Desember 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP 197604232003121002

Tembusan:
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan